

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era globalisasi dan reformasi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak hanya untuk kepentingan manajemen entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (*accountability*) dan kepada banyak pihak yang memerlukan (*stakeholder*). Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas dengan entitas lain. Untuk itu tuntutan penyedia laporan keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan. Begitu juga di dalam penyediaan informasi pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam satu periode anggaran.

Penganggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi swasta. Pada sektor publik, penyusunan anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, dievaluasi, dan diberimasuk dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang beris tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang beris tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadikan sebagai awal perubahan pemerintahan yang sentralisasi menjadi

pemerintahan Desentralisasi. Desentralisasi ini merupakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya secara otonom.

Dalam pelaksanaan di pemerintah daerah, masalah yang saat ini sering terjadi ialah permasalahan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah perwujudan dari penyajian laporan keuangan. Dimana penyajian laporan keuangan ini merupakan hasil dari pengelolaan keuangan atas penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan operasional. Dalam hal upaya untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan ialah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan pemerintah yang tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dalam memperoleh laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan akuntabel, Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menetapkan suatu kebijakan di bidang akuntansi yang bersisitentang prinsip-prinsip atau aturan-aturan pokok yang mengatur tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun kebijakan akuntansi tersebut terdiri dari unsur-

unsur dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjabarkan metode akuntansi yang

dipakai dalam penyusunan segala laporan keuangan dalam pemerintah. Pemilihan kebijakan akuntansi ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan akan metode tersebut,

sehingga hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut akan baik. Di

sisilain kebijakan akuntansi juga berpedoman kepada fungsi yang ada di

pemerintah daerah, seperti fungsi perencanaan, fungsi penyusunan APBD, dan fungsi pelaksanaan APBD.

Kebijakan akuntansi yang diatur oleh setiap masing-masing daerah berbeda, disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan tersebut,

namun dalam sistem penyusunan laporan keuangannya masih tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Anggaran sektor publik karena ada beberapa alasannya,

yaitu karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan sosial-ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam penyusunannya,

anggaran diharuskan untuk transparan,

baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran,

dan anggaran dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar

mencapai tujuan organisasi yaitu mensejahterakan masyarakat.

Anggaran pada instansi pemerintah,

selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian,

juganya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Sebagai alat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang

mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pelaporan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanatkan untuk melaksanakan program / kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Masalah yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu penganggaran pada Pemerintah Deli Serdang masih belum sesuai dengan tujuan pemerintah Deli Serdang dimana hasil penganggarnya masih belum sesuai dengan ekonomis, efisien, dan efektif sehingga masih belum mensejahterakan masyarakat Deli Serdang dan anggarannya juga belum bis dialokasikan/digunakan secara tepat karena adanya pemborosan dana yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah mengharapkan agar pemerintah Deli Serdang dapat meningkatkan akuntabilitasnya terhadap hasil laporan keuangannya.

Pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1) didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).

Ashari menyimpulkan bahwa sampai saat ini laporan keuangan Kabupaten Deli Serdang masih belum mendapat opini yang maksimal dari BPK. Meskipun segala upaya telah dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan hasil-hasil pembangunan telah banyak bermanfaat dan dirasakan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melihat pengaruh yang dapat diberikan oleh penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sumadi Suryabrata, adanya masalah karena:

Masalah atau permasalahan adalah adanya kesenjangan (gap) antara *das Soll* dan *das Sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengannya.²

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang?

²Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal.12

3. Apakah pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang ?
4. Apakah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan / pertanggungjawaban anggaran dan pemeriksaan kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
4. Untuk mengetahui apakah pelaporan/pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan daerah.

3. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan sebagai penambahan pengetahuan dan wawasan tentang akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Penganggaran

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting karena penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumberdaya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja Negara yang cenderung tanpa batas. Penganggaran merupakan aktivitas yang terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan.

Menurut Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, **anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka tertentu.**³

Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja Negara yang cenderung tanpa batas.

Menurut Mardiasmo mengemukakan bahwa:

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama masa periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penganggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan-perubahan sumber-sumber penerimaan. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan

³ Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, **Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan**: Edisi Empat, Yogyakarta, 2001, Hal. 39

⁴ Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Andi, Yogyakarta, 2002, Hal. 61

dengan perubahan-perubahan sumber-sumber penerimaan. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja.

Menurut Bachtiar Arif, Fungsi anggaranyaitu :

1. **Pedoman pengelolaan Negara, anggaran menggambarkan rencana dan pedoman pelaksanaan di dalam penyelenggaraan Negara dalam satu periode tertentu.**
2. **Anggaran sebagai alat prioritas. Jumlah pendapatan sangat terbatas sementara belanja selalu meningkat.**
3. **Anggaran sebagai alat negoisasi politik. Adanya sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah merupakan sarana negoisasi politik dengan parlemen yang terdiri dari berbagai partai politik yang memiliki tujuan yang berbeda.⁴**

2.1.1 Model Penganggaran

Beberapa model penganggaran yaitu :

1. *Line – Item Budgeting*
2. *Incremental Budgeting*
3. *Planning Programing Budgeting System*
4. *Zero –base Budgeting(ZBB)*
5. *Perfomance Budgeting*
6. *Medium Term Budgeting Framework (MTBF)*

Penjelasan dari model-model penganggaran di atas sebagai berikut:

1. *Line –Item Budgeting*

***Line–Item Budgeting* adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut ‘*Traditional Budgeting*’.**

⁴Bachtiar Arif, dkk., **Akuntansi Pemerintah**: Edisi Pertama: Salemba Empat, Jakarta, 2002, Hal. 16

Walaupun tidak dapat disangka ‘Line Item Budgeting’ sangat populer penggunaannya karena dianggap mudah untuk dilaksanakan. *Line Item Budgeting* mempunyai sejumlah karakteristik penting, yaitu tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengendalian keuangan, sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan *incremental* (kenaikan bertahap).

2. *Incremental Budgeting*

Incremental Budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka pada pos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya. Permasalahan yang harus diputuskan bersama adalah metode kenaikan penurunan (*incremental*) dari angka anggaran tahun sebelumnya. Logika sistem anggaran ini adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya.

3. *Planning Programing Budgeting System*

Planning Programing Budgeting System adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program penganggaran yang terkait dalam suatu sistem dalam kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan didalamnya terkandung indentifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul. Proses pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang diperlukan, serta pertimbangan atas implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan dimasa yang akan datang.

4. *Zero Based Budgeting (ZBB)*

Lahirnya ZBB atau *Zero Based Budgeting* merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. Tiga langkah penyusunan ZBB adalah 1) Identifikasi unit keputusan, 2) Membangun paket keputusan, 3) *Mereview* peringkat paket keputusan.

5. *Performance Budgeting*

Performance Budgeting (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Organisasi.

6. *Medium Term Budgeting Framework (MTBF)*

Medium Term Budgeting Framework (MTBF) adalah suatu kerangka strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk

departemen dan lembaga non departemen. Kerangka ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada departemen untuk penetapan alokasi dan penggunaan sumber dana dan pembangunan. Keberhasilan MTBF tergantung pada mekanisme pengambilan keputusan anggaran secara agregat yang didasarkan pada skala prioritas.⁵

2.1.2 Masalah Penganggaran

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yang timbul dalam penganggaran yaitu :

1. Waktu yang terbatas

Anggaran disusun setiap tahun dan bahkan sebelum selesai dibuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, pemerintah harus menyiapkan anggaran tahun depan. Siklus anggaran tidaklah *subsequent*(estafet), tetapi terjadi *interception* (irisan) antara satu kegiatan dengan kegiatan lain dari tahun berikutnya.

2. Ketidakseimbangan antara pendapatan dengan belanja

Sudah sangat lazim didalam penyusunan anggaran bahwa masalah utama adalah terbatasnya pendapatan dan tidak terbatasnya belanja. Untuk itu, banyak Negara mengambil jalan pintas dengan mencari pendanaan dari luar negeri untuk menutup kekurangan pendapatan. Kebijakan ini menjadi *disincentive* bagi pendapatan pajak.

3. Ketidakstabilan ekonomi dan politik

Faktor ini menyulitkan bagi pemerintah untuk menyusun anggaran yang memadai. Asumsi akan sering berubah sehingga anggaran harus direvisi.

4. Kelemahan administrasi dan akuntabilitas

Sering kali anggaran telah disusun dengan baik, tetapi administrasi belum dirancang secara memadai sehingga akuntabilitasnya menjadi lemah.

5. Pelaksanaan yang tidak memiliki kemampuan dan moral yang

memada. Ini merupakan masalah fundamental yang harus diselesaikan.

⁵ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 2006, Hal.

Kemampuan bisa ditingkatkan dengan memperhatikan sistem perekrutan, penggajian dan penghargaan serta pendidikan, latihan dan sarana yang menunjang. Akan tetapi, yang lebih penting dari itu adalah mempersiapkan mental aparat. Bagaimanapun sistem disusun apabila pelaksanaan tidak bermoral, akan rusak semuanya.

2.1.3 Fungsi Penganggaran Publik

Ada beberapa fungsi utama penganggaran yaitu:

1. Penganggaran sebagai alat perencanaan

Penganggaran merupakan suatu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Penganggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan beberapa hasil yang akan diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Penganggaran sebagai alat pengendalian

Penganggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran diharapkan mampu memberi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Penganggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Penganggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Penganggaran sebagai alat politik

Penganggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan *political tool* sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan publik membutuhkan

keahlian berorganisasi dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

5. Penganggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Penganggaran publik merupakan alat yang digunakan untuk koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Penganggaran sebagai alat penilaian kinerja

Penganggaran merupakan wujudnya komitmen dan *budget holder*. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai apabila dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

7. Penganggaran sebagai alat motivasi

Penganggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Penganggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang lingkup

Penganggaran publik tidak dapat diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPRD/DPR. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran sektor publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.

2.1.4 Tujuan Penganggaran

Penganggaran bertujuan untuk:

1. Memaksa manajer membuat rencana kerja
2. Tolak ukur mengevaluasi kinerja
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer
4. Membantu pengambilan keputusan⁶

⁶Darsono.P dan Ari Purwanri, **Penganggaran Perusahaan**: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008, Hal. 8

Penjelasan tujuan penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Memaksa manajer membuat rencana kerja

Penganggaran memaksa manajer membuat rencana artinya, manajer harus selalu berfikir proaktif tentang perubahan yang akan terjadi dimasa depan. Kemampuan memprediksi masa depan itu dituangkan dalam bentuk angka-angka satuan fisik dan satuan uang yang berorientasi pada kelangsungan hidup perusahaan.

2. Tolak ukur mengevaluasi kinerja

Penganggaran sebagai tolak ukur mengevaluasi kinerja artinya, bahwa kinerja manajemen harus dibandingkan dengan anggaran. Hasilnya adalah varian; varian dihitung dan di analisis untuk koreksi rencana, anggaran dan pelaksanaan kerja.

3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer

Penganggaran dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer artinya bahwa secara formal anggaran mengkomunikasikan rencana organisasi kepada semua level manajemen. Selanjutnya manajer mengadakan koordinasi untuk merealisasikan rencana tersebut.

4. Membantu pengambilan keputusan

Penganggaran membantu manajer dalam pengambilan keputusan artinya bahwa anggaran mengarahkan perhatian manajer untuk mengambil keputusan.

2.2 Pengertian Penganggaran Sektor publik

Menurut *National on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Penganggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

2.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas kearah tujuan organisasi.

Anggaran berfungsi sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi
6. Anggaran merupakan instrumen politik
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2.3.1 Perencanaan Anggaran

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004.

2.3.2 Pelaksanaan Anggaran

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (1) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (2) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (3) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (4) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

2.3.3 Pelaporan /Pertanggungjawaban Anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup :

- a. Laporan realisasi anggaran SKPD
- b. Neraca SKPD
- c. Catatan atas laporan keuangan SKP

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban untuk:

- a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan.

- b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek.
- c. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran.
- d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

2.4 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan *control* terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan *public* dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa hasil dari suatu entitas ke dalam bentuk fungsinya, program dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan masyarakat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan.

Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber *public* dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Akuntansi kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam mengelola organisasi publik.

Konsep *Good Corporate Governace* berkembang seiring dengan tuntutan *public* yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggungjawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia. Akuntabilitas telah menjadi salah satu item yang tercantum dalam dasar hukum atau aturan organisasi. Karena organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya.

Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independen yang memiliki

hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah.

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntansi Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas merupakan konsep yang luas dari *Stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang Steward kepada pemberi tanggungjawab.

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik Ellwood, yaitu:

1. **Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)**
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. **Akuntabilitas Proses (*process accountability*)**
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan misalnya, dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisien dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.⁷

2.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

2.5.1 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks Negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang dan kekuasaan hukum dan politik.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung-jawabkan

⁷Mardiasmo, **Op.cit.** Hal 22

pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2.5.2 Prinsip–Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip–prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsi-prinsip tersebut diatas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.5.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan *strategic*
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Pudiklatwas BPKP, 2007

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terlihat pada gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan strategis (Renstra) yang meliputi penyusunan, visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategis ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

2.6 Penelitian Terdahulu

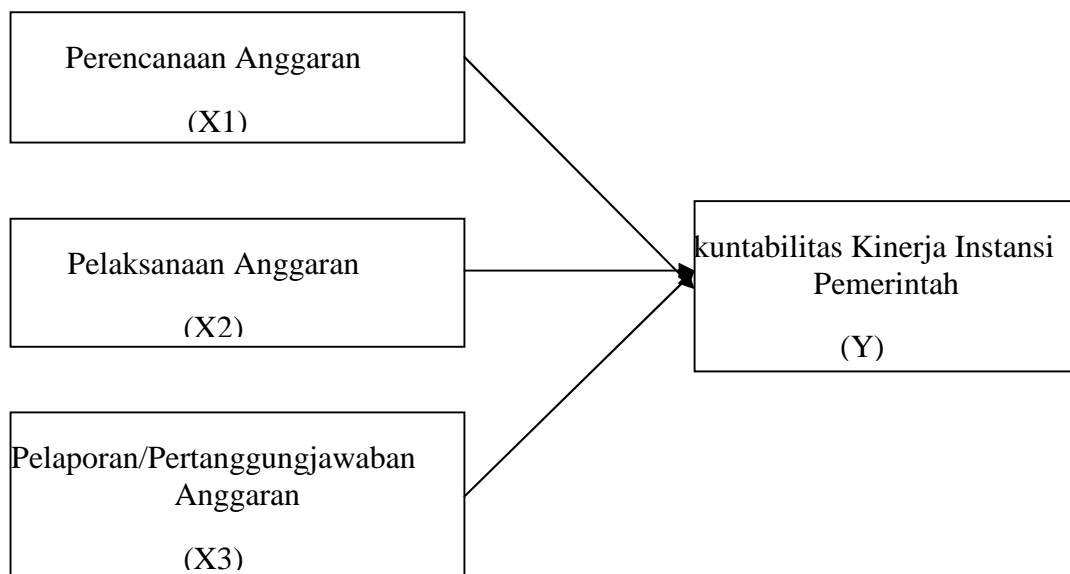
Hasil penelitian terdahulu dilakukan Desi (2016) yang berjudul Pengaruh Penganggaran Terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari kejadian teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian.

Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah daerah. Maka dari itu, anggaran harus berkualitas dan realistis adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh penerapan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan/pertanggungjawaban sehingga akan tercipta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik.



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hubungan antara pengaruh penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi yang telah dijelaskan dalam teoritis dan hasil penelitian Desi (2016) dengan judul pengaruh penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang menunjukkan hasil bahwa sebanyak 75,90% terdapat hubungan yang erat antara

variabel (X) berupa penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pegawai negeri sipil pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari variabel peneliti terdahulu mampu menjelaskan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sebesar 73,10% sedangkan sisanya 16,90% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran merupakan rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Anggaran daerah secara keseluruhan menurut undang-undang mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan mencapai sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu:

H1: Perencanaan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

2.9.2 Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang dari pada persiapan dan mempertimbangkan umpan balik pengalaman sesungguhnya. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

Maka dari uraian dapat ditarik hipotesis yaitu:

H2 :Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

2.9.3 Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP, akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen membuat laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik Hipotesis yaitu:

H3 :Pelaporan/Pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

2.9.4 Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang dalam pelaksanaan *Good Governance*.Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban secara konsep saling berhubungan. Dengan demikian proses pencapaian tujuan pemerintah 3E yaitu, Ekonomis, Efektif, dan Efisien akan dapat diawasi dalam penelitian terdahulu Desi menyimpulkan bahwa Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu:

H4 :Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan/Pertanggungjawaban berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul tentang Pengaruh Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan melakukan penelitian ini di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Mawar No. 8 Lubuk Pakam.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan antara variabel riset, atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penulis menggunakan desain penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan anggaran yang diukur dengan tiga variabel, yaitu (perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran) sebagai variabel independen berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah sebagai variabel independen. Penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan ialah data primer, yang berupa persepsi para responden terhadap variabel-variabel yang digunakan. Modus komunikasi untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3.4 Jenis Data Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Data kuantitatif, berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap

pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Menurut Elvis F dan Parulian, **“Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka-angka”**.⁸

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah data primer berupa jawaban responden terhadap seperangkat pertanyaan yang terdapat dalam 4 (empat) instrumen penelitian, yaitu: (perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

3.5 Populasi Dan Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto, **“Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi”**.⁹

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini dirancang studi kasus, maka objek penelitian hanya pada satu pemerintahan daerah saja. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset berjumlah 92 orang.

Menurut Morissan, **“Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif”**.¹⁰ Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *“Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel bertujuan pertimbangan dan kuota”. Dalam penelitian ini pengambilan sampel hanya 40 orang, karena dalam uji statistik sangat efektif jika diterapkan pada sampel yang jumlahnya lebih 30. Kriterianya dipercaya kepada responden yang memiliki jenjang pangkat jabatan Eselon IV dan Tim Anggaran tahun 2018/2019 dan memang dianggap memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 3.1

Jumlah Responden

⁸Elvis.F dan Parulian, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama: Cetakan Pertama, Sadia, Medan, 2011, Hal. 149

⁹Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Cetakan Keempatbelas: Rineka Cipta, Jakarta, 2017, Hal. 173

¹⁰Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua: Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 109

No	Nama Instansi	Jumlah (Orang)
1	Kepala BAPPEDA	1
2	Kepala SEKDA	1
3	Kepala BPKAD	1
4	Sekretaris BPKAD	1
5	Kepala Bidang Pembendaharaan	1
6	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	3
7	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1
8	Kepala Sub Bidang Pembukuan	1
9	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	3
10	Kepala Bidang Anggaran	4
11	Kepala Sub Bidang Pengendalian	2
12	Kepala Sub Bidang Penyusutan Anggaran	4
13	Kepala Sub Bidang Aset	2
14	Kepala Sub Bidang Gaji Pegawai	1
15	Kepala Sub Bidang Bagian Keuangan	2
16	Bendahara PKD dan Pengeluaran	3
17	Kepala Sub Bidang Bagian Program	1
18	Kepala Sub Bidang Bagian Umum	1
19	Bendahara Khusus Bupati dan Wakil Bupati	7
	Jumlah	40

Sumber Data : Penulis

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian ini terdiri variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Sugiyono mengatakan bahwa “**Variabel Independen (bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen(terikat)**”.¹¹Variabel independen yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah.

Tabel 3.2

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur	Skala
Variabel Independen(X)				
1. Perencanaan Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.	Pemerintah Pusat	Mengelola Negara untuk periode yang akan datang. Pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah.	Kuesioner	Likert
2. Pelaksanaan Anggaran adalah alat akuntabilitas,				

¹¹Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Kesembilanbelas: Alfabeta, Bandung, 2017, Hal. 4

<p>manajemen, kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.</p> <p>3. Pelaporan /Pertanggung-jawaban Anggaran Laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik</p>	<p>APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.</p>	<p>-Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro.</p> <p>-Memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya.</p> <p>-Menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.</p> <p>Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per-rincian objek.</p> <p>Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran.</p>		
--	--	--	--	--

	<p>Laporan realisasi anggaran SKPD</p> <p>Neraca SKPD</p> <p>Catatan atas laporan keuangan SKPD</p>	<p>Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.</p>		
<p>Variabel Dependen (Y)</p>				
<p>Akuntabilitas Kinerja Keuangan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumberdaya</p>	<p>1. Pertanggungjawaban, Keterbukaan, dan aksesibilitas</p>	<p>1. Pertanggungjawaban batas pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan.</p> <p>2. Pertanggungjawaban dilakukan dengan publikasi laporan keuangan secara teratur.</p> <p>3. Konsisten</p> <p>4. Pengelolaan</p>		

yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangkapencapaian.		keuangan secara jujur. 5. Keterbukaan operasional, penyebarluasan informasi, dan pelaporan kinerja atas program 6. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. 7. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.	
---	--	--	--

Sumber Data : Penulis

Pengukuran untuk Variabel kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* menggunakan Skala *Likert*, Sugiyono mengatakan bahwa **“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”**.¹²

Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner di mana jawaban diberi skor sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) =diberi skor 1
2. Tidak Setuju (TS) =diberi skor 2
3. Netral (N) =diberi skor 3
4. Setuju (S) =diberi skor 4
5. Sangat Setuju (SS) =diberi skor 5

¹²Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)**Cetakan Kelimabelas: Alfabeta, Bandung, 2017, Hal. 132.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Realibilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Ukuran realibilitas pada umumnya dapat dilihat berdasarkan *Alfa Cronbach* semakin dekat *Alfa Cronbach* dengan 0.6 semakin tinggi reliabilitasnya. Reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik sedangkan diatas 0.7 dapat diterima dan diatas 0.8 adalah baik.

3.7.2 Uji Validitas

Menurut Sugiyono, **“Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penelitian”**.¹³ Valid berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur. Biasanya digunakan dengan menghitung korelasi pearson antara setiap skor item instrument. Pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai posisi positif dan r hitung > r tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung < r tabel maka item dinyatakan tidak valid.

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) yang satu sama lain.

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang telah diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat multikolinieritas yang harus diatasi.

Mengukur multikolinieritas dapat diketahui berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari model penelitian dan *tolerance*. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10, dan nilai *tolerance* lebih besar dari nilai 0,1, maka dapat disimpulkan tidak ditemukan gejala multikolinieritas antar variabel independen.

¹³Sugiyono, *Ibid*, Hal. 455

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

3.8.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teori tertentu, dalam kasus ini distribusi normal. Dengan kata lain apakah data yang diperoleh dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Terdapat dua metode uji normalitas yaitu sebagai berikut:

1. Metode grafik yaitu melihat menyebar data pada sumber digital pada grafik *Normal P-Plot of regression standardized residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Uji ini digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal. Residual normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

3.9 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan suatu hubungan satu variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, selain mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi juga menunjukkan ke arah mana pengaruh tersebut.

Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana :

Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi

A : Konstanta

X₁ :Perencanaan Anggaran

X₂ :Pelaksanaan Anggaran

X₃ :Pelaporan/Pertanggungjawaban

X₄ : Pemeriksaan Kinerja

X₅ :Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran dan Pemeriksaan Kinerja

b₁ : Koefisienregresi dari X₁

b₂ :Koefisienregresi dari X₂

b₃ :Koefisienregresi dari X₃

b₄ :Koefisienregresi dari X₄

b₅ :Koefisienregresi dari X₅

e :Kesalahan residual (*error*)

Persamaan tersebut kemudian di analisis dengan tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$).

3.9.1 Uji Koefisien Determinan R²

Koefisien korelasi adalah indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan, menjadi kekuatan hubungan dan bentuk/arah hubungan. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *Adjustment Square* (*Adjusted R²*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu penganggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja keuangan. Nilai R² mempunyai interval 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai R² bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika nilai R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

3.9.2 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Menurut Danang Sunyoto, **“Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial (Individu) diperoleh secara nyata atau secara kebetulan saja.”**¹⁴ Uji ini pada dasarnya apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara parsial atau masing-masing terhadap variabel dependen. Pengujian atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0.05 maka hipotesis diterima,
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0.05 maka hipotesis ditolak.

Sedangkan penolakan atau penerimaan hipotesis dengan membandingkan antara t-hitung dan t-tabel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika t-tabel \geq t-hitung maka hipotesis diterima.
2. Jika t-hitung $<$ t-tabel maka hipotesis ditolak.

3.9.3 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Analisis Varians yaitu menguji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Menurut Morissan, **Anova memiliki kelebihan dari uji-t karena dapat digunakan untuk meneliti beberapa variabel independen secara bersamaan yang disebut ‘faktor’(factors).**¹⁵

Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA $<$ 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

¹⁴Danang Sunyoto, **Analisis Data Ekonomi Dengan Menggunakan SPSS**, Cetakan Pertama: Indeks, Jakarta Barat, 2013, Hal. 139

¹⁵ Morissan, **Op.cit** Hal. 353

Sedangkan jika pengujian dilakukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil F-hitung $>$ F-tabel maka (H_0 ditolak) variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika F-hitung \leq F-tabel maka (H_0 diterima) variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen.